

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Supomo. 1967. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnjaparamita.
- Hartono, Sunaryati C.F.G. 1978. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah*. Bandung : Alumni.
- Parlindungan, AP. 1980. *Komentor Atas Undang – Undang Pokok Agraria*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, Hanitijo Ronny. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suandra, Wayan I. 1994. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- R. Soeroso. 1994. *Praktik Hukum Acara Perdata. Tata Cara. Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fred N Kerlinger. Fred N. 1996. *Asas – Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soetianto, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Zulaika, Erni. 2000. *Pelaksanaan Azas Peradilan Cepat Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Pada Tingkat Banding*.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Edisi. 2 Cet. 2. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Edisi Revisi. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- S. W. Sumardjono Maria. 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Sutedi, Adrian. 2007. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Sutedi, Adrian. 2007. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salle, Aminuddin. 2007 *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Total Media.
- Soetami, Siti A. 2007. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syah, Iskandar Mudakir. 2007. *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta : Jala Permata.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Edisi. 1. Cet. 2. Jakarta : Sinar Grafika.
- S. W. Sumardjono, Maria. 2008. *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*. Jakarta : Kompas
- S. W. Sumardjono, Maria. 2009. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi. Sosial dan Budaya*. Jakarta : Kompas.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Zainuddin, Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Limbong Bernhard. 2011. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*. Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka.
- Limbong, Bernhard. 2011. *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Lubis, Yamin Muhammad dan Lubis, Rahim Abdul. 2011. *Pencabutan Hak Pembebasan dan Pengadaan Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Ismaya, Samun. 2013. *Hukum Administrasi Pertanahan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Murad, Rusmadi. 2013. *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Kolopaking, D.A Anita. 2013. *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

- Muliawan, Widya Jarot. 2016. *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan melalui Konsep 3 in 1 in the Land Acquisition*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Dewi Santi Gangga IGA. 2016. *Hukum Agraria*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Wignjosoebroto. Soetandyo. *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah. dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (ed.) Metode Penelitian Hukum*. Konstelasi dan Refleksi. cet. III; Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-benda yang ada di atasnya.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya.
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

C. **Jurnal dan Artikel Ilmiah**

Dwi Fratmawati, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Semarang (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya Ngaliyan – Mijen)* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2006).

Sonny Djoko Marlijanto, “*Konsinyasi Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang – Solo Kabupaten Semarang)*” (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2010).

Aldy Lazuardy Ananda, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum oleh PT.PLN Persero RJTD di Kabupaten Brebes (Studi Proyek Rekonduktoring Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 15Kv Kebasen-Brebes-Sunyaragi)* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012).

Aghisni Panji Hadi Kusumo, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Substansi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Mengalami Judicial Review*”. *Diponegoro Law Review*. Vol. 1. No. 2. (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2013).

Bambang Istijono, *Lahan Menjadi aktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Jurnal Rekayasa Sipil*. Vol. 10 No. 2. Oktober 2014. (Padang: Fakultas Teknik. Universitas Andalas. 2014).

Sahnan. *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Dosen Bidang Pertanahan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. III No. 09. Desember 2015 (Mataram: Fakultas Hukum. Universitas Mataram. 2015).

Urip Santoso, *Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan untuk Kepentingan Umum. Jurnal Perspektif*. Vol. 21 No. 1. September 2016. (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2016).

Hengky Andora, “Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”. (Jurnal Masalah – Masalah Hukum. Jilid 45 No. 2 April 2016).

Nurazima Faizrosadi, *Mekanisme Penitipan Uang Ganti Rugi (Konsinyasi) Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kegiatan Jalan Tol di Kabupaten Batang*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diiponegoro, 2018).

D. Internet

<http://jateng.tribunnews.com/2018/09/09/pemilik-lahan-terdampak-proyek-kampung-bahari-tambaklorok-merasa-tak-pernah-diajak-bicara>
diakses pada tanggal 20 November 2018.

http://jateng.tribunnews.com/2018/09/22/berita-lengkap_pembongkaran-bangunan-tambaklorok-iswar-klaim-pemilik-lahan-sudah-dapat-ganti-rugi
diakses pada tanggal 20 November 2018.

<http://jateng.tribunnews.com/2018/10/18/warga-terdampak-kampung-bahari-tambaklorok-minta-dpu-kota-semarang-tak-semena-mena>
diakses pada tanggal 20 November 2018.

<http://jateng.tribunnews.com/2018/10/31/warga-terdampak-pembangunan-kampung-bahari-tambaklorok-semarang-resmi-tempuh-kasasi>
diakses pada tanggal 21 November 2018.

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/prosedur-berperkara/prosedur-kasasi>
diakses pada tanggal 28 Desember 2018.

<http://jateng.tribunnews.com/2019/03/26/pembangunan-kampung-bahari-tambaklorok-semarang-masih-terkendala-pembebasan-lahan>
diakses pada tanggal 1 April 2019.

Pasaribu, Ignasio Ivor. 2019. *Penilaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

<https://www.hukumproperti.com/articles/penilaian-ganti-kerugian-dalam-pengadaan-tanah-bagi-pembangunan-untuk-kepentingan-umum/>
diakses pada tanggal 22 April 2019.

LAMPIRAN